

DAFTAR REFERENSI

1. BUKU

- Basuki, Sunaryo. *Hukum Tanah Nasional Landasan Hukum Penguasaan dan Penggunaan Tanah*. Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Agraria, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002/2003.
- BZN, B. Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Fauzi, Ahmad Ridwan. *Hukum Tanah Adat Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila*. Jakarta: Dewaruci, 1982.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- . *Pengamatan Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cet. 9. Jakarta: Djambatan, 2003.
- . *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*. Cet. 2. Jakarta: Universitas Trisakti, 2003.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Makarim, Edmon. *Et al. Hukum Telematika*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Masjchoensofwan, Sri Soedewi. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Cet. 4. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Cet. 6. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

- Pengajar, Tim Hukum Adat. *Hukum Adat (Hukum Kebendaan dan Perikatan Adat)*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Pengajar, Tim Land Reform dan Tata Guna Tanah. *Land Reform dan Tata Guna Tanah*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*. Ed. 2. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Soepomo. *Hubungan Individu dan Masyarakat*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 11. Jakarta: PT Intermasa, 1987.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Cet. 10. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Cet. 2. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Wignjodipoero, R. Soerojo. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- . *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cet. 14. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Wiranata, I Gede A. B. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

2. MAKALAH

- Azam, Syaiful. “Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria.” Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003.
- Hutagalung, Arie S. “Konsepsi yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional,” Makalah disampaikan pada pidatonya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 17 Maret 2003.

Soetiarto, Augie. "Sosialisasi Pembangunan Tower." Makalah disampaikan pada Pelatihan Kerja Siemens, Jakarta, 14 Juli 2006.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

———. *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

———. *Undang-Undang Tentang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881.

———. *Undang-Undang Tentang Kehutanan*, UU No. 41 Tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999.

———. *Undang-Undang Tentang Wakaf*, UU No. 41 Tahun 2004, LN No. 159 Tahun 2004, TLN No. 4459.

———. *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*. PP No. 24 Tahun 1997, LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696.

———. *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi*. PP No. 52 Tahun 2000, LN No. 107 Tahun 2000, TLN No. 3980.

———. *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi*, No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M. KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009.

Departemen Agraria. *Peraturan Menteri Negara Agraria Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Permen Agraria No. 3 Tahun 1997.

———. *Peraturan Menteri Negara Agraria Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. Permen Agraria No. 5 Tahun 1999.

Departemen Perhubungan. *Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi*. Kepmen Perhubungan No. KM 2/2001.

———. *Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi*. Kepmen Perhubungan No. KM 20/2001.

Pemerintah Kabupaten. *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*. Perda No. 14 Tahun 1999.

———. *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tentang Izin Mendirikan Bangunan*. Perda No. 14 Tahun 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

4. INTERNET

Cybernews. “Penyederhanaan Perangkat Penguasaan Tanah” <http://www.the-cybernews.com>. Diunduh 20 Februari 2010.

Daerah, Pemerintah Sumatera Selatan. “Profil Daerah” <http://sumselprov.go.id/profil.html>. Diunduh 5 Mei 2010.

Erwan. “Singkat Kisah Ogan Komering Ulu” http://kiayerwan.com/doank/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=30. Diunduh 5 Mei 2010.

Informasi, Dinas dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten OKU. “Profil Kecamatan Baturaja Barat” <http://okukab.go.id/profil.html>. Diunduh 5 Mei 2010.

———. “Sejarah Ogan Komering Ulu” <http://okukab.go.id/sejarah.html>. Diunduh 5 Mei 2010.

Wikipedia. “Telekomunikasi Seluler di Indonesia” http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi_Seluler_di_Indonesia. Diunduh 20 Februari 2010.